

## **Peranan Perbankan dalam Usaha Penguatan Modal Pembibitan Ternak Sapi Potong Skala Menengah Guna Mendukung Kecukupan Daging Nasional**

### ***Business Banking Role In Strengthening Capital Beef Cattle Breeding Medium Scale To Support National Meat Sufficiency***

**Bambang Winarso**

*Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian*

#### **ABSTRACT**

*Availability of feeder cattle in the quality and quantity sufficient to encourage increased production and cattle population. Therefore, the availability of feeder cattle as the upstream component in animal breeding should be a priority. Failure to feeder cattle selection may impede the achievement of production targets, loss of time and expense in the cattle business that requires a long period of time. In an effort to meet the needs of the national meat consumption. On that basis, this paper aims to conduct a study and simulation of financial feasibility. The location is an area of research that has developed and undeveloped areas but prospectively both in terms of mastery of technology and the existing livestock population. East Java and Bali was chosen to represent developed areas with relatively high population. West Java and Jambi is a region which has good prospects for the cultivation of beef cattle. The results showed that cattle farming is profitable enough, it's just not supported by sufficient venture capital. Actually, the government has facilitated KUPS (Kredit Usaha Peternakan Sapi), but is still considered KUPS requirements strictly and only for breeding efforts. Such things make farmers reluctant to use.*

Diterima: 14 April 2014, disetujui 23 Mei 2014

#### **PENDAHULUAN**

Program swasembada daging nasional khususnya daging sapi diarahkan agar kebutuhan konsumsi daging secara nasional sebagian besar dapat terpenuhi oleh produk daging dalam negeri. Keberhasilan program tersebut berimplikasi pada menurunnya persentase impor baik sapi hidup terutama sapi bakalan maupun daging sapi. Keberlanjutan program ini dimaksudkan agar di masa mendatang secara perlahan diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada daging. Pemenuhan kebutuhan konsumsi daging secara nasional terutama daging sapi, saat ini sebagian masih tergantung oleh pasokan impor. Permintaan daging sapi apabila hanya dipenuhi melalui pemotongan sapi lokal, dapat berakibat terjadinya pengurangan jumlah populasi sapi lokal. Oleh

karena itu diperlukan program usaha pembibitan sapi secara nasional sebagai sumber sapi bakalan untuk penggemukan maupun sumber sapi induk yang berkualitas.

Usaha pembibitan sapi potong saat ini, sebagian besar diusahakan dan dikembangkan oleh usaha peternakan rakyat dengan pola produksi induk-anak (*cow-calf operation*) dalam skala usaha kecil, dan umumnya terintegrasi dengan usaha pertanian lainnya. Peningkatan populasi ternak memerlukan upaya-upaya tertentu melalui peningkatan kinerja usaha ternak sapi potong dari skala kecil menjadi skala menengah dan dari skala menengah diharapkan dapat berkembang menjadi skala besar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan usaha pembibitan ternak sapi potong terutama ke skala menengah.

Usaha budidaya pembibitan ternak sapi potong skala menengah pada dasarnya sama seperti usaha lain yaitu berorientasi keuntungan. Akan tetapi usaha pembibitan ternak sapi potong merupakan kegiatan yang membutuhkan rentang waktu panjang untuk memetik keuntungan yang akan dihasilkannya. Artinya sebuah keuntungan akan diperoleh manakala produk yang diharapkan telah terealisasi atau berhasil diproduksi. Untuk menghasilkan seekor sapi bakalan, dibutuhkan waktu lama yaitu sejak sapi betina birahi telah berhasil dikawinkan baik secara alami maupun melalui Inseminasi Buatan (IB) sampai dengan pedet yang dilahirkan dapat disapih.

Winarso dkk. (2012) mengemukakan bahwa yang dimaksud usaha ternak sapi potong skala menengah setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Usaha budidaya ternak sapi potong yang merupakan usaha pokok dan pendapatannya mampu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan (sesuai dengan kebutuhan gizi tubuh), papan, pendidikan (menengah) dan kesehatan keluarga.
- b. Usaha budidaya ternak sapi potong yang apabila ketersediaan tenaga kerja keluarga sendiri tidak mencukupi, maka sangat dimungkinkan akan melibatkan tenaga kerja di luar keluarga, artinya usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha.
- c. Walaupun usaha budidaya ternak sapi potong tersebut merupakan usaha sampingan, maka hasil usaha yang berasal dari budidaya ternak sapi potong dapat menyumbang pendapatan keluarga setidaknya besarnya sumbangan tersebut dapat untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga sesuai dengan point (a) tersebut diatas.
- d. Usaha budidaya ternak sapi potong yang dapat dilakukan dalam bentuk usaha formal maupun informal baik perorangan, kelompok maupun berbadan usaha.
- e. Usaha yang telah memanfaatkan teknologi yang ada baik dalam pengadaan pakan maupun kegiatan produksi lainnya dan tidak dilakukan secara manual, sehingga budidaya ternak dapat dilakukan secara mudah dan murah.
- f. Dilakukan secara intensif dan fokus ke bisnis dengan target keuntungan yang harus dicapai

Kegiatan tersebut memakan waktu lebih dari satu tahun dalam satu kali putaran modal/siklus produksi. Kondisi yang demikian menjadikan perputaran modal menjadi lamban. Selain itu, usaha pembibitan ternak sapi potong dihadapkan pada resiko usaha yang tinggi. Sejak dari kegagalan perkawinan terutama melalui Inseminasi Buatan (IB), keguguran kebuntingan, kematian pedet/induk saat melahirkan dan kematian pedet sebelum sapih, bahkan kematian bakalan setelah sapih. Hal yang demikian terkadang dijadikan alasan oleh sementara pihak bahwa usaha pembibitan ternak sapi potong kurang menarik. Hal ini juga yang dijadikan alasan mengapa

kegiatan tersebut kurang mendapat perhatian secara serius dari pihak perbankan untuk memberikan fasilitas pinjaman modal usaha kepada para peternak.

Usaha pembibitan ternak sapi potong merupakan kegiatan investasi modal kerja yang tidak saja menggunakan kekayaan pribadi, tetapi tidak sedikit yang memerlukan dukungan modal pinjaman. Selain itu, kegiatan usaha ini memerlukan investasi aset yang sifatnya tetap, seperti lahan, kandang dan bangunan-bangunan lainnya dalam jumlah besar. Kegiatan usaha dengan investasi yang tidak sedikit tersebut, menjadikan usaha ini harus sehat agar kegiatannya dapat berjalan dengan baik dan tetap bertahan. Untuk mencapai hal tersebut, perlu diciptakan perputaran aset yang cepat. Perputaran aset yang cepat berarti perlu ditunjang oleh kinerja usaha yang baik, yaitu usaha budidaya pembibitan ternak sapi potong harus mampu menghasilkan ternak bakalan sebanyak mungkin. Dengan cara demikian diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi yang mengusahakannya. Kecepatan berputarnya asset ditentukan oleh perbandingan antara tingginya produk terjual terhadap total investasi yang ditanamkan. Hal ini yang sebenarnya merupakan indikator usaha tersebut bisa dikatakan sehat atau tidak sehat.

Realisasi di lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya usaha pembibitan ternak skala menengah telah muncul di beberapa wilayah. Usaha tersebut umumnya masih bersifat campuran antara pembibitan dan pengemukan. Kondisi yang demikian mengindikasikan bahwa usaha pembibitan sapi potong skala menengah masih perlu didukung oleh usaha lainnya agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerugian usaha. Hal itu juga menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha pembibitan skala menengah rentan terhadap kerugian. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dicarikan solusi, agar usaha pembibitan khususnya perkembangbiakan ternak sapi potong dapat menghasilkan sebanyak mungkin sapi bakalan sehingga usahanya dapat berkembang dengan baik.

Ada beberapa pola usaha budidaya ternak sapi potong yang telah berkembang di masyarakat. Pola-pola tersebut diantaranya adalah (a) pola kelompok/gabungan kelompok ternak, (b) koperasi ternak, (c) perusahaan (d) pola mandiri perseorangan, dan (e) pola kemitraan. Pola-pola tersebut telah berkembang dengan sistem pemeliharaan secara intensif, semi intensif maupun ekstensif. Pola-pola usaha tersebut juga dapat berkembang melalui sistem integrasi antara sapi dengan komoditas tanaman, seperti tumpangsari antara sapi dengan kelapa sawit, sapi dengan padi, sapi dengan tanaman kakao maupun sapi dengan tanaman lainnya (Ilham dkk., 2008).

Perkembangan populasi ternak sapi potong selama sembilan tahun terakhir (2000 – 2011) tumbuh rata-rata 2,39 %/thn dari jumlah populasi sebesar 11,00 juta ekor pada tahun 2000 meningkat menjadi 14,82 juta ekor pada tahun 2009 (BPS, Ditjen Peternakan, tahun 2012). Perkembangan populasi tersebut masih dipandang lemah, sebab laju perkembangan pertumbuhan populasi secara riil belum mampu menutupi kebutuhan konsumsi daging sapi dalam negeri, sehingga kekurangan tersebut masih perlu ditutupi dari impor.

Permentan No. 19/Permentan/OT.140/2/2010 menunjukkan bahwa ada 5 (sasaran) utama dalam pelaksanaan Program Swasembada Daging Sapi thn 2014. Diantara target sasaran tersebut adalah meningkatnya populasi sapi potong menjadi 14,2 juta ekor tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,48% dan tercapainya penurunan impor sapi dan daging sehingga hanya mencapai 10% dari kebutuhan konsumsi masyarakat. Berdasarkan data statistik tersebut berarti upaya peningkatan populasi ternak sapi potong menjadi sebesar 14,2 juta ekor sebenarnya telah terlampaui sejak tahun 2011. Skim kredit yang bersumber dari perbankan seperti yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 131/MPK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Juncto Peraturan Menteri Keuangan No. 241/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.05/2009. Pada peraturan tersebut yang

dimaksud Usaha Pembibitan Sapi adalah suatu usaha kegiatan budidaya yang menghasilkan bibit ternak sapi. Yang mana usaha tersebut dapat dilakukan oleh pelaku usaha yaitu perusahaan peternakan, koperasi peternakan dan kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi.

KUPS merupakan skim kredit bersubsidi, yaitu peternak atau pelaku usaha mendapat bantuan kredit tersebut hanya membayar bunga sebesar 5% dari bunga komersial yang berlaku. Sedangkan selisih bunga menjadi tanggungan pemerintah. Seperti diketahui bahwa saat ini usaha pembibitan sapi di tingkat peternakan rakyat berjalan sangat lambat. Sementara perusahaan swasta yang bergerak dalam pembibitan ternak sapi belum banyak yang terjun ke usaha tersebut. Ini karena untuk mendapatkan kredit usaha pada lembaga finansial khususnya perbankan dikenakan suku bunga komersial cukup tinggi yaitu sebesar 13%-14%.

Bunga sebesar itu sangat tidak layak bagi usaha pembibitan sapi, untuk itu perlu iklim yang dapat mendorong perusahaan swasta terutama skala menengah untuk mau terjun ke usaha pembibitan ternak sapi. Salah satu cara adalah melalui kredit dengan bunga rendah. Dengan keluarnya KUPS diharapkan bahwa target untuk mencapai swasembada daging pada 2014 bisa tercapai. Tujuan program tersebut diantaranya adalah bahwa selama lima tahun (2009-2013), diharapkan ada penumbuhan minimal 50 industri perbibitan swasta dan pusat pembibitan di masyarakat sebanyak 11.310 kelompok. Selain itu adanya peningkatan populasi sapi betina sebanyak 1,6 juta ekor disamping diharapkan mampu memberikan lapangan kerja sekitar 514.000 orang.

Usaha budidaya pembibitan ternak sapi potong terutama dalam skala menengah pada dasarnya merupakan usaha bisnis dengan keuntungan yang diinginkan oleh setiap peternak yang mengusahakannya. Usaha pembibitan ternak sapi potong merupakan kegiatan yang membutuhkan rentang waktu yang cukup panjang untuk memetik keuntungan tersebut. Usaha ini juga membutuhkan biaya dan permodalan yang tinggi. Berapapun jumlah ternak yang dipelihara baik dalam usaha skala kecil, skala menengah maupun skala besar membutuhkan alokasi dana/modal untuk membiayai kegiatan tersebut agar usahanya dapat terus berkesinambungan juga menguntungkan. Hingga saat ini minat pemodal untuk mengembangkan usaha dibidang pembibitan ternak sapi potong masih lemah, permasalahan ini perlu ditelaah secara cermat baik menyangkut permasalahan prospek bisnis yang menyangkut perputaran modal maupun kesehatan usaha.

Kajian ini menganalisis sampai sejauh mana modal yang sudah diinvestasikan dalam bentuk usaha pembibitan ternak sapi potong di tingkat peternak mampu menciptakan usaha bisnis yang sehat dan bisa memberikan keuntungan. Metode penelitian tingkat kesehatan usaha dianalisis menggunakan analisis finansial yang menggabungkan antara rasio aktivitas dan margin laba terhadap hasil penjualan (*Return On Investment Analisis*). Analisis ini menunjukkan bagaimana rasio-rasio tersebut saling berinteraksi dalam menentukan profitabilitas dari aktiva yang ada. Penekanan lebih pada melihat efisiensi usaha yang diinvestasikan sampai sejauh mana hasil pengembalian atas investasi yang ditanamkan (Weston J.F and Copeland T.E; 1987). Metode ROI (*Return On Investment*) merupakan salah satu solusi yang dipakai dalam kajian ini. Besaran ROI pada dasarnya didekati melalui formula sebagai berikut :

- a. ROI =  $\frac{NP}{S} \times TATO$  dimana
- b. TATO =  $\frac{S}{WC}$
- c.  $\frac{NP}{S}$  =  $\frac{NP}{S}$
- d.  $\frac{NP}{S}$  =  $(WC + PI)$

$$\begin{aligned} \text{e. NP} &= S - (\text{HP} + \text{CS} + \text{AC}), \\ \text{f. WCa} &= \text{CA} + \text{PD} + \text{Inv} \end{aligned}$$

**Keterangan :**

<i>ROI</i>	=	<i>Return On Investment</i>	=	<i>Prosentase Net Profit from Sales</i>
<i>TATO</i>	=	<i>Total Assets Turn Over</i>		
<i>S</i>	=	<i>Sales (hasil penjualan)</i>		
<i>NP</i>	=	<i>Net Provit (laba bersih)</i>		
<i>WCa</i>	=	<i>Working Capital (modal kerja)</i>		
<i>PI</i>	=	<i>Permanent Investment</i>		
<i>HP</i>	=	<i>Harga Pokok</i>		
<i>CS</i>	=	<i>Sales Cost(biaya penjualan)</i>		
<i>AC</i>	=	<i>Administration Cost (biaya administrasi)</i>		
<i>CA</i>	=	<i>Current Asset</i>		
<i>PD</i>	=	<i>Piutang Dagang</i>		
<i>Inv</i>	=	<i>Inventory (aktiva tetap)</i>	$\square I$	= <i>Total Investment (total investasi)</i>

Efektivitas investasi dapat didekati dari melihat sampai sejauh mana tingkat perputaran asset yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis. Hal tersebut merupakan indikator bahwa kegiatan usaha dapat dikatakan sehat atau tidak sehat, tidak semata-mata dilihat dari besarnya omset penjualan. Akan tetapi perlu juga dilihat sampai sejauh mana modal yang ada mampu bekerja secara efektif, artinya selain dapat memberikan persentase keuntungan, juga melihat sampai sejauh mana setiap bagian dari komponen-komponen biaya dapat berkontribusi secara maksimal. Dengan demikian maka tidak hanya omset penjualan yang baik yang diharapkan, akan tetapi tingkat kemampuan perputaran modal yang akan menentukan tingkat keberhasilan suatu investasi yang dilakukan.

Secara metodologis tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian Prospek Pengembangan Pembibitan Ternak Sapi Potong Skala Menengah Dalam Upaya Mendukung Swasembada Daging Nasional yang dilakukan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang dilakukan pada tahun 2012. Lokasi kajian dilakukan di wilayah sentra pengembangan ternak sapi potong yang sudah berkembang maupun daerah yang belum berkembang akan tetapi prospektif baik di Jawa maupun di Luar Jawa. Daerah terpilih adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Bali dan Provinsi Jambi. Propinsi Jawa Barat dan Provinsi Jambi merupakan wilayah pengembangan usaha budidaya pembibitan ternak sapi potong skala menengah. Sementara Propinsi Jawa Timur dan Bali merupakan wilayah sentra ternak nasional yang sudah cukup berkembang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Modal Usaha**

Masalah serius yang dihadapi oleh kelompok peternak adalah lemahnya penguasaan modal, sehingga perlu bantuan kredit berbunga lunak. Pemecahannya adalah bagaimana agar kegiatan usaha pemeliharaan sapi potong, terutama dalam usaha perbibitan dapat berjalan efektif, sehingga bisa memberikan pendapatan layak. Salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh peternak sapi potong khususnya usaha pembibitan adalah lemahnya modal usaha. Ketentuan Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2010, menunjukkan bahwa

terdapat 2(dua) program prioritas yaitu (a) penanggulangan Kemiskinan dengan tindakan perluasan jangkauan KUR dengan keluarannya berupa Penyaluran KUR oleh BPD dan Peningkatan Pangsa Penyaluran KUR kepada Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Industri Kecil. (b) Ketahanan Pangan dengan tindakan berupa Peningkatan akses petani/peternak kepada Kredit Program (KKPE, KPEN-RP, KUPS dan KUR). Inpres No. 3 Tahun 2010 juga menjelaskan tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, dengan fokus Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil berupa penyusunan rencana Tindak Perluasan KUR di Tingkat Pemerintah Daerah dengan keluaran berupa Kebijakan Pemda mengenai Rencana Tindak Operasional Perluasan Penyaluran KUR terutama untuk Sektor Perikanan dan Kelautan, Industri, Pertanian, Kehutanan.

Berdasarkan jenis penyaluran ada 2(dua) macam kredit program yang disalurkan oleh pemerintah yaitu (a) Kredit program dengan subsidi bunga dan (b) kredit program dengan penjaminan pemerintah. Kredit program dengan subsidi bunga pendanaan berasal dari Bank Pelaksana yang disalurkan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan tingkat bunga pasar, namun sebagian menjadi beban pemerintah dalam bentuk subsidi bunga. Kredit program dengan skema ini adalah KKP-E, KPEN-RP, dan KUPS. Sementara kredit program dengan penjaminan pemerintah adalah merupakan penyediaan kredit/pembiayaan bersumber dari dana perbankan dengan penjaminan oleh pemerintah melalui perusahaan penjamin. Jenis kredit ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Jenis kredit program bersubsidi untuk sektor pertanian, diantaranya adalah (a) KKP-E adalah kredit investasi dan modal kerja yang diberikan oleh Perbankan kepada petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi yang didukung dengan subsidi bunga dari pemerintah. (b) KPEN-RP adalah kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada petani sawit, kakao, dan karet yang didukung dengan subsidi bunga oleh pemerintah kepada petani. (c) KUPS adalah kredit yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang didukung dengan subsidi bunga oleh Pemerintah.

#### b. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)

Kebijakan pemerintah dalam membantu kebutuhan modal usaha pembibitan sapi potong adalah KUPS. KUPS adalah skim kredit yang digunakan untuk mendanai pengembangan usaha pembibitan sapi potong maupun sapi perah oleh pelaku usaha dengan suku bunga bersubsidi. Pelaku usaha meliputi perusahaan, koperasi, gabungan kelompok peternak atau kelompok peternak. Informasi dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa ada sepuluh bank telah menyalurkan KUPS melalui Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) dengan Kementerian Keuangan, yaitu (a) Bank Umum, terdiri atas Bank BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan (b) Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, BPD Sumut, dan Bank Nagari Sumatera Barat. Persyaratan bagi pelaku usaha adalah mampu menyediakan sapi, memenuhi prosedur baku dan melakukan kemitraan. Suku bunga sebesar 5% per tahun dalam jangka waktu kredit paling lama 6 tahun, dengan masa tenggang (*grace periode*) paling lama 24 bulan. Sasaran KUPS adalah tersedianya satu juta ekor sapi dalam kurun waktu 5 tahun (200.000 ekor/tahun). Sapi induk tersebut berupa sapi betina bunting atau siap bunting, berasal dari sapi impor, turunan impor atau sapi lokal terutama sapi Bali.

Tabel 1 : Realisasi Penyaluran Kredit Program KUPS s/d Bulan FEBRUARI 2012

No	BANK	PKP (Rp.)	REALIASI KREDIT (Rp.)	(%)
1	BRI	2,000,000,000,000	110,610,674,000	5.53
2	BNI	500,000,000,000	72,418,657,000	14.48
3	Bank Mandiri	100,000,000,000	37,342,425,000	37.34
4	Bank Jatim	1,030,000,000,000	112,031,361,160	10.88
5	Bank Jateng	50,000,000,000	16,569,727,000	33.14
6	Bank BPD DIY	25,000,000,000	2,650,000,000	10.6
7	Bank Nagari	25,000,000,000	13,359,483,000	53.44
8	Bank Sumut	60,000,000,000	45,641,206,700	76.07
9	Bank BPD Bali	60,000,000,000	10,254,266,200	17.09
10	Bank BPD NTB	12,953,000,000	1,972,500,000	15.23
11	Bank Bukopin	50,000,000,000	-	-
Jumlah		3,912,953,000,000	422,850,300,060	10.81

Sumber : Bank Indonesia, 2011.

Bank yang telah berkomitmen melakukan Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) dengan Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan KUPS sebanyak 10. Komitmen dana yang terkumpul dari 10 Bank tersebut adalah sebesar Rp. 3.91 trilyun (Tabel 1).

Informasi dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa dari 10 (sepuluh) bank tersebut, BPD DIY, BPD Jatim, BPD Jateng, BRI dan BNI telah selesai penandatanganan PKP antara Kementerian Keuangan dengan bank, dan 4 (empat) bank BPD DIY, BPD Jatim, BPD Jateng, dan BRI telah menyalurkan dana kepada peserta KUPS sedangkan penyaluran dana dari bank BNI direncanakan pada bulan Maret 2010. Sampai bulan Februari 2010 telah tercatat 27 Perusahaan/Koperasi telah mengusulkan KUPS untuk sejumlah sapi 43.215 ekor dan telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten setempat. Realisasi bulan Januari 2010 senilai Rp. 89,81 milyar untuk pengadaan 5.080 ekor sapi potong dan 965 ekor sapi perah pada 1 kelompok peternak, 1 perusahaan dan 3 koperasi (Anonimous, 2012).

KUPS adalah Kredit yang diberikan kepada bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi. Jenis kredit ini memiliki jangka waktu program sampai dengan tahun 2014. Sumber dana adalah Bank Pelaksana 100%, dengan besarnya Plafon kredit Maksimal Rp 66.315.000.000,00 per pelaku usaha baik yang dilakukan oleh perusahaan pembibitan, koperasi maupun kelompok/gabungan kelompok peternak. KUPS difasilitasi dengan Suku Bunga Kredit maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 6%.

Peran Pemerintah diantaranya adalah (a) Kementerian Keuangan : menetapkan Bank Pelaksana, melakukan kerjasama dengan Bank Pelaksana, menetapkan plafon per Bank, menyediakan dan membayar subsidi bunga, menilai kepatuhan penyaluran KUPS. (b) Mentan, Menkeu, Gubernur, Bupati/ Walikota : pembinaan dan pengendalian pelaksanaan KUPS. (c) Dinas Kab/Kota: memberikan rekomendasi perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gab.kelompok sebagai peserta KUPS, mengetahui kontrak kemitraan, monitoring dan evaluasi, menyampaikan laporan kepada Dinas Prov. (d) Ditjen Peternakan melakukan monitoring dan evaluasi.

Permasalahan penyaluran KUPS menurut BI diantaranya bahwa dari segi debitur, permasalahan yang dapat dijumpai adalah (a) Ketersediaan informasi calon debitur potensial (b) Legalitas kepemilikan aset UMKM, (c) Sulit mendapatkan perusahaan inti (*close system*), (d)

Perusahaan pembibitan sapi masih sedikit. Sementara untuk keamanan skim kredit maka diperlukan asuransi kematian ternak. Dilihat dari posisi Bank/Dinas, maka resiko yang cukup tinggi adalah (a) Resiko kematian ternak dan (b) Resiko usaha (pengalaman debitur). Sebagai tindak lanjut adalah perlu adanya sinergitas Program Kerja Bersama dalam Kementerian Pertanian itu sendiri yaitu, (a) Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas UMKM menjadi *feasible* dan *bankable*, (b) Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Dinas, bank, dan UMKM, (c) Peningkatan peran kemitraan dengan perusahaan besar/inti dan (d) Monitoring dan evaluasi penyaluran kredit program.

Upaya penguatan modal usaha budidaya ternak sapi potong yang dilakukan tercermin dari informasi Bank Indonesia menunjukkan bahwa Kredit perbankan kepada sektor pertanian pada Desember 2011 mencapai Rp114,72 triliun, meningkat 26,05% (ytd) atau Rp23,71 triliun selama tahun 2011. Besarnya Pangsa kredit pertanian mencapai 5,18% dari total kredit perbankan sebesar Rp2.216,5 triliun, relatif tetap dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010 sebesar 5,12%. Kredit UMKM sektor pertanian pada Desember 2011 mencapai Rp30,57 triliun, meningkat 55,03% (ytd) atau Rp10,85 triliun selama tahun 2011, sedangkan kredit UMKM tumbuh sebesar 22,43% (ytd).

Pangsa kredit UMKM sektor pertanian mencapai 6,42% dari total kredit UMKM sebesar Rp475,76 triliun, meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun 2010 sebesar 5,07%. Berdasarkan total kredit perbankan sektor pertanian pada sebesar Rp114,72 triliun, terbanyak disalurkan kepada sub sektor perkebunan, sedangkan pangan hanya mencapai 3,60% dan pembibitan budidaya sapi hanya sebesar 1,15%. Total kredit UMKM sektor pertanian sebesar Rp30,57 triliun, terbanyak disalurkan kepada sub sektor perkebunan, sedangkan pangan mencapai 18,46% dan budidaya sapi hanya sebesar 4,34%.

Berdasarkan informasi sosialisasi penyempurnaan PERMENTAN No 40/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi) bahwa Berdasarkan a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) telah terbit dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. (b) Serta telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/PD.400/3/2012 tanggal Maret 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KUPS. Dan (c) Permentan Nomor 12/2012 menggantikan Permentan 40/2009. Selain revisi pedoman pelaksanaan KUPS, dalam rangka percepatan penyaluran KUPS, beberapa daerah telah mendirikan Lembaga Penjamin Kredit (LPKD) yaitu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali. Beberapa provinsi lain yang sedang dalam proses pengajuan LPKD kepada BAPPEPAM-LK antara lain adalah Provinsi DI Aceh, Riau, DKI Jakarta, Bangka Belitung, NTB, Banten, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan.

#### c. Realisasi Perputaran Modal Kerja di Lapangan

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua responden yang berhasil dikunjungi memiliki catatan transaksi keuangan terutama menyangkut kegiatan usaha yang ada hubungannya dengan pengembangan ternak sapi potong. Catatan transaksi tersebut utamanya menyangkut pembelian ternak dan penjualan hasil ternak (ternak bakalan, limbah ternak baik padat maupun cair) atau menyangkut kematian dan kelahiran ternak. Tidak adanya informasi tersebut menyebabkan data riil usaha budidaya ternak sapi potong yang didapatkan sangat terbatas.



Tabel 2: Kinerja Usaha Budidaya Ternak Sapi Potong (Pembibitan dan Pengemukan Yang Dilakukan Oleh Kelompok SMD "Raharja Insani" Di Garut Selama Thn 2011-2012

No	Kelompok	Kelompok "Raharja Insani" (Program SMD)	
		Thn 2011	Thn 2012
1	Investasi permanen (kdg)	60.000.000	161.000.000
2	Peralatan	20.000.000	75.000.000
3	Assets Ternak	222.000.000	1996.000.000
4	Total Investasi	302.000.000	2.232.000.000
5	Piutang Dagang	0	0
6	Modal Kerja (WC)	360.000.000	3.699.940.000
7	Penjualan (S)	0	3.742.500.000
8	Biaya penjualan&adm	0	70.740.000
9	Biaya Operasional	58.000.000	1.397.200.000
10	Harga pokok	0	3.463.940.000
11	Untung bersih/Net Profit	0	278.560.000
12	(%) Net Profit from sales	0	7.44
13	Perputaran Asset (ATO)	0	1.67
14	Perputaran Investasi (%)	0	12.42

#### - Kasus Jawa Barat

Kasus di Jawa Barat menunjukkan bahwa catatan usaha yang berhasil didapatkan yaitu data keuangan yang dimiliki oleh kelompok tani "Raharja Insani" merupakan kelompok tani ternak peserta Program SMD (Sarjana Membangun Desa) dari Garut Prop. Jawa Barat yang usahanya baru berjalan dua tahun. Akan tetapi sehubungan dengan pengelolaan yang baik, maka kinerja perputaran assetnya mampu menunjukkan kinerja yang baik. Melalui pola usaha budidaya campuran (35% pembibitan dan 65% penggemukan) asset yang ada mampu berputar sebesar 1.67 kali. Artinya usaha tersebut sangat positif, sehingga disamping mampu meningkatkan akumulasi modal kerja dari Rp 360 juta pada awal kegiatan (2011) meningkat menjadi Rp 1.47 milyar pada periode tahun 2012 (Tabel 2).

#### -Kasus Jawa Timur

Sampai saat ini kasus di wilayah Kab. Ngawi Jawa Timur telah mampu menyerap dana KKPE sebesar Rp 36 milyar yang digunakan untuk menambah kebutuhan modal para peternak. Sementara itu dalam pemanfaatan KUPS tampaknya dana KUPS yang telah tersedia belum bisa diserap. Tidak adanya penyerapan dana KUPS salah satu penyebabnya adalah belum adanya sosialisasi yang baik ke peternak. KUPS tidak sepenuhnya bisa diserap oleh peternak karena: (i) usaha pembibitan sapi belum mendapat respon positif dari pihak bank kalau usaha tersebut dikembangkan secara mandiri, (ii) persyaratan untuk mengambil kredit KUPS cukup ketat atau kompleks, sehingga sulit diikuti secara rasional, misalnya harus membeli ternak impor pada rekanan tertentu yang kualitas ternaknya kurang baik, tetapi harganya jauh lebih tinggi dibanding harga sapi lokal, (iii) informasi yang tidak sampai ke peternak, sehingga banyak peternak yang tidak tahu tentang keberadaan Program KUPS, walaupun sebenarnya memiliki agunan.

Sebagai akibat dari semua di atas, maka muncul beberapa kasus di lapangan yang menunjukkan bahwa pemilik modal yang mampu mengakses KUPS sebagian merupakan individu pengusaha yang sekedar mengatasnamakan kelompok untuk memperlancar proses pengajuan dan pencairan kredit. Bahkan sebagian kreditur memanfaatkan kredit KUPS dengan bunga bersubsidi dari pemerintah untuk membiayai usaha pribadi.

Sementara Kasus di Kab. Pasuruan menunjukkan bahwa kegiatan bantuan kredit program KUPS dipandang masih mengandung kelemahan diantaranya adalah peranan perbankan sangat

dominan, dalam penentuan pengadaan pakanpun ternak. Salah satu kasus adalah dalam pengadaan ternak sapi potong yang berkaitan dengan program tersebut, bahwa berdasarkan JUKNIS menunjukkan bahwa sapi bibit yang akan disalurkan ke peternak harus sapi impor yang pengadaannya sudah ditentukan yaitu salah satu feedloter yang berdomisili di wilayah Kab. Cianjur. Pola yang demikian menyebabkan tingginya harga ternak dan ongkos pengangkutan ternak dari Cianjur ke peternak yaitu Rp 15 juta sampai dengan Rp 17,5 juta. Penyaluran KUPS tersebut dilakukan lewat Bank Jatim.

**-Kasus Jambi**

Salah satu kasus yang erat hubungannya dengan masalah permodalan adalah kebutuhan modal bagi peternak di areal perkebunan kelapa sawit yang saat ini sedang dihadapkan pada masalah *replanting* tanaman sawit. Saat *replanting* dilakukan, kesulitan ekonomi keluarga pasti terjadi, karena terbatasnya pendapatan. Pemerintah diharapkan membantu modal untuk pengadaan ternak, terutama bagi petani sawit yang belum memiliki ternak. Hal ini sebagai pengganti usaha saat *replanting* tanaman tersebut dilakukan. Diperlukan waktu empat tahun lamanya bagi petani untuk menunggu sebelum tanaman sawit yang baru mulai panen.

Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak semua responden yang berhasil dikunjungi memiliki catatan transaksi keuangan terutama menyangkut kegiatan usaha yang ada hubungannya dengan pengembangan ternak sapi potong. Catatan transaksi tersebut utamanya menyangkut pembelian ternak dan penjualan hasil ternak (ternak bakalan, limbah ternak baik padat maupun cair) atau menyangkut kematian dan kelahiran ternak. Tidak adanya informasi tersebut menyebabkan data riil usaha budidaya ternak sapi potong yang didapatkan sangat terbatas. Data yang catatan usaha yang berhasil didapatkan yaitu data keuangan yang dimiliki oleh kelompok tani "Lawu Merapi" dari Prop. Jambi yang merupakan kelompok tani ternak peserta Program Integrasi Tanaman Ternak.

Tabel 3: Perkembangan Kinerja Usaha Pengembangan Pembibitan Ternak Sapi Potong oleh Kelompok Ternak "Lawu Merapi" di Jambi Selama Thn 2008 – 2011.

No	Kelompok	Kelompok Lawu Merapi (Program Integrasi Sawit-Ternak)			
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010	Thn 2011
1	Investasi permanen (kdg)	5000.000	5000.000	5000.000	5000.000
2	Peralatan	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
3	Assets Ternak	50.000.000	193.000.000	173.500.000	264.500.000
4	Total Investasi	56.500.000	200.000.000	181.000.000	267.000.000
5	Piutang Dagang	0	0	0	0
6	Modal Kerja (WC)	69.130.000	233.750.000	228.320.000	333.220.000
7	Penjualan (S)	64.000.000	235.500.000	262.000.000	398.000.000
8	Biaya penjualan&adm	9.200.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
9	Biaya Operasional*)	3.430.000	9.750.000	23.320.000	42.220.000
10	Harga Pokok	62.630.000	226.750.000	220.820.000	330.720.000
11	Untung bersih/Net Profit	1.870.000	6.625.000	38.180.000	70.280.000
12	(%) Net Profit from sales	2.14	3.71	15.71	16.90
13	Perputaran Asset	1.13	1.18	1.44	1.49
14	Perputaran Investasi (%)	2.41	4.37	22.62	25.14

\*) Termasuk biaya penyusutan peralatan

Salah satu informasi tentang perkembangan kinerja usaha pengembangan pembibitan ternak sapi potong yang berhasil dihimpun adalah laporan finansial oleh kelompok tani ternak Lawu Merapi selama thn 2008 – 2011 ditampilkan dalam Tabel 3.

Data pada Tabel 3 mengindikasikan bahwa seiring rentang waktu usaha pembibitan ternak yang dilakukan oleh kelompok Lawu Merapi maka semakin besar omset usaha budidaya ternak sapi potong yang dilakukan oleh kelompok tani ternak Lawu Merapi menunjukkan disamping aset mampu berputar lebih baik, dan perputaran modal yang diinvestasikan juga mampu lebih cepat. Hal ini berarti bahwa tingkat efisiensi usaha akan semakin membaik manakala skala usahanya semakin besar. Kasus pada kelompok terani ternak Lawu Merapi menunjukkan bahwa usaha budidaya pembibitan sapi potong dengan pola semi intensif menunjukkan kecenderungan keberhasilan usaha yang semakin meningkat sejalan dengan besarnya jumlah ternak yang diusahakan. Bertambahnya penguasaan usaha ternak akan berdampak terhadap meningkatnya omset penjualan ternak yang dilakukan yang pada akhirnya akan memperbesar modal usaha/modal kerja. Sejalan dengan meningkatnya modal kerja maka keuntungan bersih yang didapatkan juga meningkat. Walaupun biaya operasional juga mengalami peningkatan akan tetapi skalanya masih jauh lebih baik dari keuntungan yang didapatkan.

Pada sisi lain masalah permodalan yang dihadapi oleh peternak yang tergabung dalam kelompok tani-ternak terutama di sekitar areal perkebunan kelapa sawit juga hampir senada yaitu adanya bantuan modal pinjaman. Pinjaman sangat diharapkan oleh para petani pekebun mengingat mereka umumnya mempunyai lahan kebun bersertifikat yang bisa dijadikan agunan ke lembaga perbankan guna mendapatkan pinjaman modal. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana pola pemeliharaan sapi potong yang efektif yang bisa memberikan pendapatan layak sehingga mampu membayar angsuran pinjaman dan juga dapat memberikan hasil tambahan bagi setiap anggota kelompok.

Dengan adanya keterbatasan modal, maka upaya untuk menambah skala usaha masih menemui kendala. Peternak sapi potong yang berdomisili di wilayah perkebunan kelapa sawit mengandalkan hidupnya dari hasil sawit. Pada saat ini petani ternak yang bersangkutan sedang dihadapkan pada masalah replanting tanaman sawitnya yang sudah berumur tua. Manakala replanting tersebut dilakukan, maka kesulitan ekonomi keluarga pasti akan terjadi. Diharapkan pemerintah dapat membantu modal usaha untuk pengadaan ternak terutama bagi petani sawit yang belum memiliki ternak sebagai pengganti usaha manakala replanting tanaman tersebut dilakukan. Pada saat replanting tanaman sawit, maka petani harus menunggu 4 tahun lamanya, hingga tanaman sawit baru dapat mulai di panen.

#### d. Simulasi Optimalisasi Kelayakan Usaha

Usaha budidaya ternak sapi potong senantiasa dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan terutama fluktuasi harga produk maupun harga input produksi yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kinerja usaha itu sendiri. Ternak bakalan sebagai salah satu produk budidaya pembibitan, tapi disisi lain dapat merupakan faktor produksi bagi peternak yang mengusahakan ternak sapi potong dengan pola penggemukan. Manakala terjadi fluktuasi harga ternak baik bakalan maupun ternak penggemukan akan berimplikasi terhadap kinerja usaha maupun keuntungan usaha yang juga berpengaruh terhadap kesehatan usaha.

Hasil analisis simulasi terhadap beberapa kejadian yang diasumsikan, maka dampak yang akan dialami oleh peternak sangat bervariasi tergantung pola usaha yang dilakukan apakah penggemukan, pembibitan atau campuran dan juga tergantung skala usaha ternak yang dikuasainya. Data hasil analisa pada Tabel 4 menunjukkan bahwa usaha budidaya ternak dengan menggunakan faktor input yang tidak terlalu besar seperti kasus kelompok tani ternak Lawu Merapi lebih stabil terutama pengaruhnya terhadap *asset turn over* manakala terjadi fluktuasi harga

baik harga ternak maupun harga input lainnya. Hal ini disebabkan karena kelompok tani ternak Lawu merapi yang merupakan kelompok Program Integrasi sawi ternak dengan pola budidaya semi intensif memang tidak banyak membutuhkan biaya faktor produksi lainnya. Kalupun ada hanya sebatas biaya IB dan sedikit obat-obatan terutama obat cacing yang memang tidak terlalu mahal.

Kasus pada kelompok tani ternak Raharja Insani merupakan gambaran dari usaha sapi potong dengan pola intensif dominan penggemukan, maka manakala terjadi fluktuasi harga dampak yang dirasakan akan lebih besar baik pengaruh kenaikan maupun penurunan harga ternak dan harga input lainnya. Pengaruh fluktuasi harga terhadap *asset turn over* maupun terhadap *rate on investment*. Kedua hal tersebut lebih sensitif dialami oleh kelompok tani ternak Raharja Insani. Hal ini disebabkan karena intensitas biaya yang relatif tinggi baik dalam pengadaan bakalan, pengadaan pakan serta infrastruktur peternakan lainnya seperti gudang, pabrik pakan mini dan sejenisnya yang sensitif terhadap harga maupun depresiasi.

Tabel 4: Hasil analisa simulasi harga ternak dan biaya lainnya terhadap kinerja usaha budidaya ternak sapi potong pada dua responden kelompok tani ternak, thn 2012.

No	Dinamika Harga		Net Profit From Sale (%)	Asset turn over (kali)	Rate on Investment (%)	Net Profit From Sale (%)	Asset turn over (kali)	Rate on Investment (%)
	Ternak	biaya lain						
			Kel. Tani ternak Lawu Merapi			Kel.tani ternak Raharja Insani		
1	normal	Normal	16,9	1,46	24,74	7,44	1,68	12,48
2	10%	Normal	18,42	1,47	27,02	11,01	1,69	18,64
3	20%	Normal	19,68	1,47	28,93	13,98	1,71	23,86
4	normal	10%	15,24	1,46	22,3	3,52	1,68	5,90
5	normal	20%	13,58	1,46	19,87	-0,40	1,68	-0,67
6	10%	10%	16,9	1,47	24,8	7,44	1,69	12,60
7	20%	20%	16,9	1,47	24,85	7,44	1,71	12,70
8	(-10%)	Normal	15,06	1,46	21,96	3,08	1,66	5,11
9	(-20%)	Normal	12,74	1,45	18,52	-2,36	1,63	-3,86
10	normal	(-10%)	18,57	1,46	27,17	11,37	1,68	19,06
11	Normal	(-20%)	20,23	1,46	29,6	15,29	1,68	25,63
12	(-10%)	(-10%)	16,9	1,46	24,66	7,44	1,66	12,34
13	(-20%)	(-29%)	16,9	1,45	24,57	7,44	1,63	12,16

#### f. Solusi dan upaya pemecahan masalah

Dalam upaya mengungkit skala pemeliharaan dari skala kecil ke skala menengah terutama bagi peternak di sentra produksi sangat membutuhkan bantuan kredit berbunga lunak (KUPS) agar para peternak yang bersangkutan mampu memperbesar skala usahanya. Hal yang penting adalah perlu adanya modifikasi yang lebih berpihak kepada peternak-peternak potensial. Dukungan teknologi IB/TE dari instansi terkait bila perlu adanya peningkatan kerjasama dengan swasta pelaku breeding. Hal yang cukup penting adalah adanya pendampingan, pembinaan oleh petugas kepada setiap kelompok sangat dibutuhkan, agar keberadaan serta kualitas kelembagaan kelompok tani ternak lebih mantap adanya.

Kegiatan operasional dalam mewujudkan **PSDS** 2014 kaitannya dengan kegiatan operasional penyelamatan sapi betina produktif merupakan salah satu operasional yang sangat strategis dalam upaya penyelamatan "mesin" produksi sapi bakalan. Seharusnya hal ini tidak saja menjadi kebutuhan pemerintah, melainkan juga merupakan kebutuhan para peternak itu sendiri

terutama bagi peternak yang berkecimpung dalam usaha pembibitan. Fleksibilitas penyaluran kredit KUPS kepada peternak perlu ditingkatkan. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa banyak peternak yang mau menekuni usaha pembibitan tetapi aturan untuk mendapatkan KUPS sangat rumit dan kaku. Hal ini tentu merupakan kendala yang harus diatasi.

Hal serius yang dihadapi oleh kelompok peternak lainnya adalah lemahnya modal, sehingga perlu kredit berbunga lunak. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kegiatan usaha pengembangbiakan sapi potong berjalan efektif dan memberikan pendapatan layak. Keterbatasan modal menjadi penghalang bagi peternak untuk menambah skala usaha. Kasus di perkebunan kelapa sawit menjadi contoh bahwa saat replanting perlu ada usaha pengganti, minimal selama empat tahun dan ternak sangat tepat untuk itu. Pemerintah telah memberi subsidi bunga melalui program usaha pengembangbiakan sapi potong, yaitu Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Persyaratan bagi pelaku usaha adalah mampu menyediakan sapi induk, memenuhi prosedur baku dan melakukan kemitraan. Suku bunga 5% per tahun dalam waktu paling lama 6 tahun, dengan masa tenggang (*grace periode*) 24 bulan. Sasaran KUPS adalah tersedianya satu juta ekor sapi dalam kurun waktu 5 tahun (200.000 ekor/tahun).

Penyebab lambatnya penyerapan KUPS adalah modal usaha dan hal ini berakibat pada sulitnya pelaku usaha mengembangkan usaha pengembangbiakan sapi. Hal ini terjadi karena antara lain: (i) usaha pembibitan sapi belum mendapat respon positif dari bank kalau dikembangkan secara mandiri, (ii) persyaratan untuk mengambil kredit KUPS cukup ketat, tidak rasional, misalnya harus membeli ternak impor dengan kualitas ternak kurang baik, tetapi harganya lebih tinggi dari harga sapi lokal, (iii) informasi tentang KUPS tidak sampai ke peternak, sehingga peternak tidak tahu, walaupun sebenarnya memiliki agunan. Akibat dari semua itu, pemilik modal yang mengakses KUPS adalah pengusaha yang mengatasnamakan kelompok untuk memperlancar proses memperoleh kredit. Potensi adanya penyimpangan alokasi pinjaman tersebut seharusnya diketahui oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan kelancaran penyaluran KUPS, maka diperlukan persyaratan yang lebih fleksibel. Misalnya, KUPS yang semula seluruhnya untuk membiayai usaha pembibitan, kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali. Peternak mengharapkan KUPS berlaku untuk usaha campuran, yaitu 40 persen dialokasikan untuk usaha pembibitan dan 60 persen untuk usaha penggemukan. Hal ini penting dipertimbangkan agar terjadi subsidi silang antara usaha pembibitan dan usaha penggemukan. Dengan demikian, resiko usaha pembibitan sapi dapat didukung oleh usaha lainnya.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

Persyaratan KUPS yang ketat dan hanya untuk usaha pengembangbiakan, menjadikan peternak enggan memanfaatkan. Terdapat penyalahgunaan KUPS oleh sebagian kreditur, yaitu untuk pengembangan usaha lainnya. Kurang lancarnya informasi tentang KUPS kepada peternak menyebabkan mereka tidak tahu KUPS, walaupun sebenarnya bisa mengaksesnya. Sementara itu, di Jambi peternak individu skala menengah yang sangat potensial belum banyak dikenal oleh dinas terkait. Berarti, Jambi yang memiliki potensi lahan subur untuk sapi potong, belum digarap dengan serius. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya peran Dinas Peternakan baik tingkat propinsi maupun kabupaten.

Kajian financial menunjukkan bahwa secara umum budidaya sapi potong cukup menguntungkan, seperti pada pola integrasi antara tanaman dan ternak, terutama pada perkebunan sawit. Sekalipun usaha tersebut penghasil sapi bakalan, hasilnya tetap layak untuk dikembangkan lebih jauh, terutama untuk pemeliharaan semi intensif, artinya, biayanya relatif rendah. Pada program SMD, apabila pola pemeliharaan dilakukan secara intensif dengan sistim campuran (penghasil bakalan dan penggemukan), hasilnya positif, tetapi diperlukan kemampuan bisnis ternak yang memadai.

Sebagai implikasi Kebijakan adalah kinerja program yang dinilai belum optimal pada dasarnya dapat dikembalikan pada tahapan persiapan, termasuk dalam seleksi penerima program. Pelaksana program SMD dan pengusaha yang berkapasitas dibidangnya dijamin mampu berkiprah sesuai harapan. Akan tetapi program-program lainnya seperti KUR juga sudah diakses oleh peternak untuk menambah modal usahanya. Kebijakan aturan penyaluran KUPS perlu ditinjau kembali, agar peternak mampu memanfaatkan fasilitas tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anonimous; 2011; Fasilitas Bank Indonesia Dalam Mendorong Peningkatan Penyaluran KUPS; Seminar FGD: Mendorong Percepatan Investasi Usaha Perbibitan Ternak Sapi; Bogor, Maret 2012.

Ditjen Peternakan; 2012; Statistik Peternakan.

Ilham, Yusdja, Nurmanaf, Winarso dan Supadi; 2008; Perumusan model Pengembangan Skala Usaha dan Kelembagaan Usaha Sapi Potong; Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, dengan fokus Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Menteri Keuangan No. 241/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.05/2009.

Permentan No. 19/Permentan/OT.140/2/2010 Tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014.

Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.05/2009, tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), tanggal 18 Agustus 2009.

Permentan No. 40/Permentan/PD.400/9/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan KUPS, tertanggal 8 September 2009

Weston J.Fand Copeland; 1987; Managerial Finance; Eighth Edition; CBS Collage Publishing.

Winarso, Basuno, Iswariyadi dan Nurasa; 2012; Prospek Pengembangan Pembibitan Ternak sapi Potong Skala Menengah Dalam Upaya Mendukung Swasembada Daging Nasional; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; Badan Litbang Pertanian.